

Faktor-Faktor Penentu Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Oleh :

Nayla Salsabilla¹

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

naylaasabilla@gmail.com

Desi Indriasari²

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

desi_indriasari@polsri.ac.id

Maulidia Berlianti³

Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

maulidia.berlianti@polsri.ac.id

Co Author *naylaasabilla@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 1 September 2026

Direview : 7 Oktober 2026

Disetujui : 15 Oktober 2026

Diterbitkan: 1 November 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of fiscal stress, intergovernmental revenue, regional government complexity, and capital expenditure on the level of mandatory disclosure in provincial government financial statements on Sumatera Island. The study uses a quantitative method with a panel data regression approach. The sample consists of 10 provincial governments observed from 2020 to 2024, producing 50 observations. The data are analyzed using EViews 12. The results show that fiscal stress and intergovernmental revenue have negative and significant effects on mandatory disclosure. Regional government complexity and capital expenditure do not have significant effects. Simultaneously, the four independent variables significantly affect mandatory disclosure. The adjusted R-squared value of 0.688141 indicates that the model explains 68.81% of the variation in mandatory disclosure.

Keywords: Capital Expenditure, Fiscal Stress, Intergovernmental Revenue, The Level of Mandatory Disclosure, Regional Government Complexity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh fiscal stress, intergovernmental revenue, kompleksitas pemerintah daerah, dan belanja modal terhadap Tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan regresi data panel. Sampel mencakup 10 pemerintah provinsi selama 2020-2024 sehingga menghasilkan 50 observasi. Data dianalisis menggunakan EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan fiscal stress dan intergovernmental revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib. Kompleksitas pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,688141 menunjukkan model menjelaskan 68,81% variasi tingkat pengungkapan wajib.

Kata Kunci: Belanja Modal, Fiscal Stress, Intergovernmental Revenue, Kompleksitas Pemerintah Daerah, Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah

PENDAHULUAN

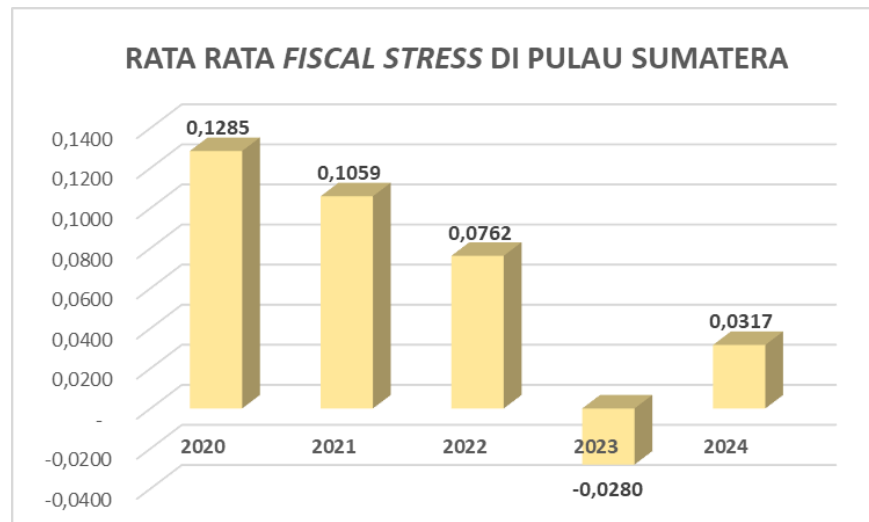
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan pemerintah dalam suatu periode. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang relevan untuk menilai kondisi keuangan, kinerja, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah terdiri atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta informasi tambahan yang diperlukan. Suwardjono (2020) membedakan pengungkapan menjadi mandatory disclosure dan voluntary disclosure. Mandatory disclosure merupakan informasi yang wajib disajikan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Meskipun ketentuan mengenai pengungkapan telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan,

penerapannya pada pemerintah daerah masih menunjukkan perbedaan.

Aliyah et al. (2024) menunjukkan bahwa determinasi tingkat pengungkapan wajib di Pulau Sumatera hanya mencapai 38,7%, sedangkan Luthfi & Sari, (2023) menemukan rata-rata tingkat pengungkapan terendah pada salah satu provinsi di Pulau Sumatera sebesar 47,02%. Selain itu, Utami & Sulardi, (2020) menemukan rata-rata tingkat pengungkapan sebesar 60,42%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya seragam.

Perbedaan tingkat pengungkapan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan pemerintah daerah, salah satunya fiscal stress. Fiscal stress menggambarkan tekanan keuangan yang terjadi ketika kemampuan pendapatan daerah terbatas dalam memenuhi kebutuhan belanja (Putri et al. 2023). Kondisi fiskal yang berbeda antar daerah dapat memengaruhi kapasitas pemerintah dalam mengelola keuangan dan memenuhi tuntutan akuntabilitas. Pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera, rata-rata fiscal stress selama 2020–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dan mencapai nilai -0,0280 pada tahun 2023. Perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika kondisi fiskal pemerintah daerah selama periode penelitian.



Sumber: Data diolah penulis (2026)

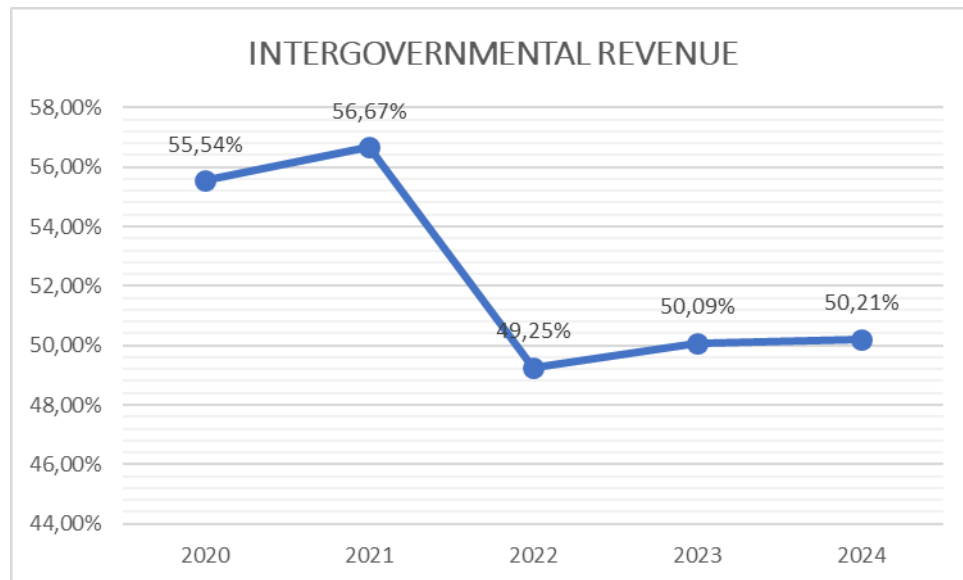
Gambar 1. Grafik Tren Fiscal Stress di Pulau Sumatera Tahun 2020–2024

Selain fiscal stress, intergovernmental revenue juga menjadi faktor yang relevan dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Intergovernmental revenue merupakan

pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah (Jannah & Handayani, 2025). Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer

dapat meningkatkan tuntutan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara transparan. Data pemerintah provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa proporsi intergovernmental revenue terhadap pendapatan daerah masih relatif tinggi, yaitu

sebesar 55,54% pada 2020, 56,67% pada 2021, 49,25% pada 2022, 50,09% pada 2023, dan 50,21% pada 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dana transfer masih menjadi bagian penting dalam struktur pendapatan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera.



Sumber: Data diolah Penulis (2026)

Gambar 2. Grafik Tren Intergovernmental Revenue di Pulau Sumatera Tahun 2020–2024

Faktor berikutnya adalah kompleksitas pemerintah daerah, yang mencerminkan banyaknya fungsi, tugas, dan kegiatan yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Semakin kompleks struktur organisasi pemerintah, semakin besar pula informasi yang perlu dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, kompleksitas pemerintah daerah diukur berdasarkan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan data 10 provinsi di Pulau Sumatera, rata-rata jumlah OPD sebesar 39,10 pada 2020, kemudian 38,30 pada 2021, meningkat menjadi 39,50 pada 2022, menurun menjadi 38,30 pada 2023, dan sebesar 38,60 pada 2024. Fluktuasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat kompleksitas antarprovinsi selama periode penelitian.

Pengungkapan laporan keuangan juga dapat berkaitan dengan belanja modal pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Semakin besar belanja modal yang dikelola, semakin besar pula transaksi dan aset yang perlu

dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, belanja modal dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan secara lebih lengkap sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sari et al. (2024) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan, sedangkan Putra et al. (2023) menemukan adanya pengaruh. Pada variabel intergovernmental revenue, Simbolon dan Kurniawan (2018) menemukan tidak adanya pengaruh, sementara Jannah dan Handayani (2025) menemukan adanya pengaruh. Selanjutnya, Finakesti et al. (2022) menemukan bahwa kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan, sedangkan Hiola & Harun (2021) menunjukkan hasil yang berbeda. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap yang masih perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) telah dilakukan oleh Aliyah et al. (2024) pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2018–2022 dengan menguji tingkat ketergantungan, rasio kemandirian keuangan, jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan temuan audit. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menguji Fiscal Stress, Intergovernmental Revenue, Kompleksitas Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal sebagai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah provinsi selama periode 2020–2024. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kombinasi variabel independen yang berbeda serta pengujian kembali faktor-faktor penentu pengungkapan wajib menggunakan periode pengamatan yang lebih baru.

Pulau Sumatera dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki perbedaan kondisi pembangunan, perekonomian, kapasitas fiskal, serta karakteristik pemerintah daerah antarprovinsi. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan variasi dalam kemampuan pemerintah daerah mengelola pendapatan, belanja, struktur organisasi, dan kewajiban pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh fiscal stress, intergovernmental revenue, kompleksitas pemerintah daerah, dan belanja modal terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2020–2024. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah fiscal stress berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah provinsi di pulau Sumatera, apakah intergovernmental revenue berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah provinsi di pulau Sumatera, apakah kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah provinsi di pulau Sumatera, apakah belanja modal berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah provinsi di pulau Sumatera.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori Stewardship menjelaskan bahwa pihak yang diberi tanggung jawab mengelola organisasi akan bertindak untuk kepentingan pemilik dan tujuan organisasi. Pengelola dipandang dapat dipercaya, berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab (Sopiyan et al., 2024). Dalam sektor publik, pemerintah daerah berperan sebagai

steward yang mengelola sumber daya publik, sedangkan masyarakat menjadi principal yang memberikan amanah. Pemerintah daerah harus mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mempertanggungjawabkannya melalui laporan keuangan (Anggara & Cheisviyanny, 2020).

Teori Agensi

Teori agensi memberikan wewenang dan menjalankan tugas. sektor publik, masyarakat dan pemerintah pusat dapat dipandang sebagai principal, sedangkan pemerintah daerah menjadi agent. Perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan informasi dapat menimbulkan asimetri informasi. Pengungkapan laporan keuangan menjadi sarana pengawasan dan pertanggungjawaban agar principal memperoleh informasi yang memadai mengenai pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2021).

Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengungkapan merupakan penyajian informasi yang relevan dan memadai bagi pengguna laporan keuangan. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah informasi yang harus disajikan berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) merupakan informasi tambahan di luar ketentuan wajib. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, pengungkapan wajib terutama tercermin dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berfungsi memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai informasi dalam laporan keuangan utama.

Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi umum entitas pelaporan, kebijakan fiskal dan ekonomi makro, pencapaian target keuangan, dasar penyusunan laporan, kebijakan akuntansi, serta rincian pos-pos laporan keuangan dan informasi lain yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini mengukur tingkat pengungkapan wajib menggunakan disclosure checklist yang terdiri atas 53 item berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Item pengungkapan tersebut mencakup PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi, PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, PSAP 08 tentang Akuntansi

Konstruksi dalam Pengerjaan, dan PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban. Pemilihan standar tersebut didasarkan pada cakupan pengungkapan informasi umum dalam CaLK serta informasi terperinci mengenai persediaan, investasi, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan kewajiban. Dengan demikian, pengukuran mencakup aspek pengungkapan dalam CaLK dan pengungkapan atas pos-pos laporan keuangan yang relevan dengan standar tersebut.

Pengukuran dilakukan melalui metode scoring dengan sistem penilaian dikotomis, yaitu

skor 1 diberikan apabila item yang diwajibkan diungkapkan dalam laporan keuangan dan skor 0 apabila item tersebut tidak diungkapkan maupun item yang tidak dapat diterapkan (not applicable).. Tingkat pengungkapan wajib dihitung berdasarkan perbandingan jumlah item yang diungkapkan dengan jumlah item yang menjadi dasar penilaian, kemudian dikalikan 100%. Semakin tinggi persentase yang diperoleh, semakin besar proporsi item pengungkapan wajib yang dipenuhi berdasarkan checklist penelitian.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Pengungkapan Wajib

Kategori	Persentase Pengungkapan
Sangat rendah	0%-20%
Rendah	21%-40%
Cukup	41%-60%
Tinggi	61%-80%
Sangat tinggi	81%-100%

Sumber: Arikunto (2012) dalam Luthfi dan Sari (2023).

Fiscal Stress

Fiscal stress adalah kondisi wajib dan komitmen keuangan lain. Arnett (2012) menjelaskan fiscal stress sebagai tekanan keuangan yang muncul akibat keterbatasan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja. Dalam perspektif stewardship, pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya publik memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan masyarakat serta mewujudkan akuntabilitas melalui pengungkapan laporan keuangan yang memadai (Fahira & Musyarofah, 2023). Tekanan yang tinggi dapat membatasi sumber daya untuk menyusun pengungkapan yang lengkap, tetapi juga dapat mendorong pemerintah menjelaskan kondisi keuangannya kepada masyarakat. Penelitian ini mengukur fiscal stress dengan rasio selisih pendapatan dan belanja terhadap pendapatan daerah.

Fiscal Stress dijelaskan dengan dua kecenderungan perilaku ketika pemerintah mengalami tekanan fiskal. Pertama, pemerintah dapat membatasi informasi untuk menghindari persepsi negatif atas kondisi keuangannya. Kedua, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dengan menjelaskan tekanan keuangan dan langkah penanganannya. Dua kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa arah hubungan fiscal stress dan pengungkapan perlu diuji secara empiris.

Rasio fiscal stress dalam penelitian ini dihitung dari selisih pendapatan dan belanja daerah yang dibagi dengan pendapatan daerah. Nilai rasio yang semakin rendah atau negatif mengindikasikan tekanan fiskal yang semakin tinggi, sedangkan nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan kondisi fiskal yang relatif lebih sehat. Dengan demikian, rasio yang digunakan dalam estimasi regresi bergerak berlawanan arah dengan tingkat fiscal stress.

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental revenue merupakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan dan kewenangan daerah (Astuti et al., 2022). Dana transfer mencerminkan hubungan keuangan antara principal dan agent. Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut melalui laporan keuangan. Penelitian ini mengukur intergovernmental revenue menggunakan proporsi.

Komponen utama intergovernmental revenue adalah dana perimbangan, yang mencakup dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum terdiri atas Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, sedangkan dana transfer khusus mencakup Dana Alokasi Khusus.

Besarnya transfer menunjukkan sumber daya yang dipercayakan.

Menurut teori agensi, peningkatan dana transfer semestinya meningkatkan pertanggungjawaban karena pemerintah pusat dan masyarakat membutuhkan informasi tentang penggunaan dana. Namun, ketergantungan yang tinggi juga dapat mengurangi kemandirian fiskal. Kondisi tersebut membuat hubungan antara transfer dan pengungkapan tidak selalu searah.

Kompleksitas Pemerintah Daerah

Kompleksitas pemerintah daerah menggambarkan tingkat kerumitan struktur organisasi dan pelaksanaan fungsi pemerintahan (Putri et al., 2023). Jumlah OPD digunakan sebagai proksi karena menunjukkan banyaknya unit kerja yang harus dikoordinasikan. Secara teoritis, jumlah OPD yang lebih besar meningkatkan kebutuhan dokumentasi dan pertanggungjawaban, tetapi kewajiban pengungkapan tetap berlaku sama bagi seluruh pemerintah daerah.

Setiap OPD menjalankan fungsi dan program yang menghasilkan transaksi, aset, kewajiban, serta informasi anggaran. Semakin banyak OPD, semakin besar kebutuhan konsolidasi data dan koordinasi penyusunan laporan. Namun, jumlah OPD hanya menggambarkan struktur organisasi dan tidak secara langsung mengukur kualitas sistem informasi, kompetensi aparatur, atau efektivitas pengawasan.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Praptiningsih dan Khoirunnisa (2020) menjelaskan bahwa belanja modal dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Aktivitas pembangunan dan pengadaan aset meningkatkan tuntutan transparansi, tetapi tingkat pengungkapan juga bergantung pada kepatuhan dan kualitas pengelolaan laporan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 membagi setiap kelompok memiliki karakteristik pencatatan dan pengungkapan yang berbeda. Pemerintah daerah harus menjelaskan perolehan, nilai, penggunaan, dan kondisi aset yang terkait dengan pengeluaran tersebut. Belanja modal yang tinggi meningkatkan jumlah transaksi aset dan kebutuhan rekonsiliasi antar-OPD. Namun, besarnya pengeluaran tidak otomatis memperluas pengungkapan apabila sistem

pencatatan dan kepatuhan belum memadai. Hal ini menjadi alasan hubungan belanja modal dan pengungkapan masih menunjukkan hasil yang berbeda pada penelitian terdahulu.

Hipotesis

Pengaruh Fiscal Stress terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah

Teori stewardship memandang pemerintah daerah sebagai steward yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik dan menyampaikan informasi keuangan secara transparan kepada masyarakat (Donaldson & Davis, 1991). Ketika menghadapi fiscal stress, pemerintah daerah mengalami tekanan dalam memenuhi kebutuhan belanja sehingga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan yang lebih lengkap dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik.

Sejalan dengan teori agensi, pengungkapan informasi keuangan dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai pihak yang mengelola keuangan dan masyarakat serta pemerintah pusat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2021). Dalam kondisi tekanan fiskal, pengungkapan informasi mengenai kondisi dan pengelolaan keuangan dapat menjadi salah satu bentuk transparansi pemerintah daerah.

Fasa et al. (2022) menemukan adanya pengaruh kondisi keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan relevansi kondisi keuangan dalam menjelaskan pengungkapan, meskipun kondisi keuangan tidak serta-merta identik dengan fiscal stress. Berdasarkan argumentasi teoretis tersebut, tekanan fiskal diperkirakan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan wajib laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, fiscal stress diukur menggunakan rasio selisih pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan daerah. Nilai rasio yang semakin rendah atau negatif mengindikasikan tekanan fiskal yang semakin tinggi, sedangkan nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan kondisi fiskal yang relatif lebih sehat. Oleh karena

H₁: Fiscal stress berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam perspektif stewardship, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya secara efektif dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Intergovernmental revenue merupakan pendapatan yang berasal dari pemerintah tingkat atas dan menjadi salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah (Salfadhilah et al., 2021). Besarnya penerimaan transfer antarpemerintah dapat menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Ketergantungan tersebut dapat menyebabkan pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih terbatas dalam pengelolaan sumber daya secara mandiri, sehingga tidak selalu mendorong peningkatan pengungkapan informasi keuangan secara lebih luas.

Sari et al. (2024) serta Simbolon & Kurniawan (2018) menemukan bahwa intergovernmental revenue berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi pendapatan yang berasal dari pemerintah tingkat atas, semakin rendah tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, peningkatan intergovernmental revenue diperkirakan berhubungan dengan penurunan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah.

H₂: Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah

Teori stewardship menjelaskan bahwa semakin kompleks suatu pemerintah daerah, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah

dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya publik. Kompleksitas dalam penelitian ini diprosikan dengan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Semakin banyak OPD, semakin luas fungsi, kegiatan, dan informasi yang perlu dikelola serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

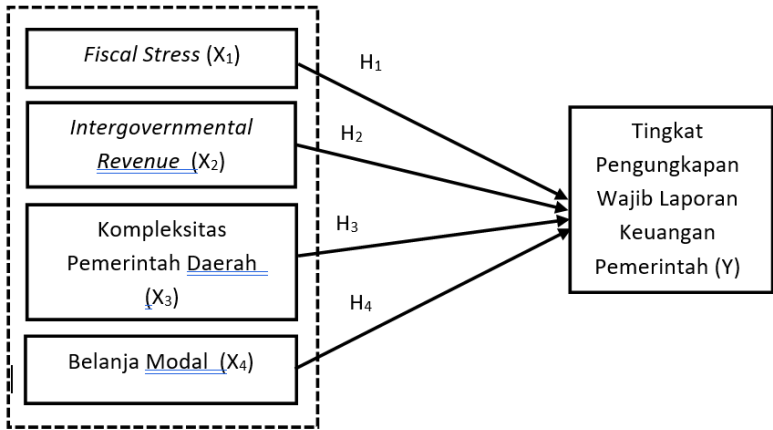
Dalam perspektif teori agensi, pengungkapan informasi yang lebih lengkap juga diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal. Finakesti et al. (2022) dan Ananda (2021) menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dengan demikian, semakin tinggi kompleksitas pemerintah daerah, semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan.

H₃: Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah

Teori stewardship memandang pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Semakin besar belanja modal, semakin besar pula aktivitas pengelolaan aset dan penggunaan anggaran yang perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terdorong untuk meningkatkan transparansi melalui pengungkapan informasi keuangan yang lebih lengkap. Putra et al. (2023) serta Sulistyowati dan Rahmayati (2024) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar belanja modal, semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

H₄: Belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah.



Sumber: Data diolah Penulis (2026)

Gambar 3. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder. Objek penelitian mencakup 10 pemerintah provinsi di Pulau Sumatera selama 2020-2024. Data diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui portal E-PPID BPK RI. Unit analisis adalah pemerintah provinsi. Teknik pengambilan sampel menggunakan

nonprobability sampling dengan sampel jenuh, sehingga seluruh provinsi dalam populasi menjadi sampel. Lima tahun pengamatan menghasilkan 50 observasi.

Variabel dependen adalah tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah. Variabel independen terdiri atas fiscal stress, intergovernmental revenue, kompleksitas pemerintah daerah, dan belanja modal.

Tabel 2. Pemerintah Provinsi yang menjadi Sampel

No.	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Jambi
6	Sumatera Selatan
7	Bengkulu
8	Lampung
9	Kepulauan Bangka Belitung
10	Kepulauan Riau

Sumber: E-PPID BPK RI (2026).

Sampel jenuh dipilih karena jumlah populasi terbatas dan seluruh provinsi memiliki data yang diperlukan selama periode penelitian. Struktur data terdiri atas 10 unit cross section dan lima

periode time series. Kombinasi tersebut menghasilkan panel seimbang dengan 50 observasi.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Tingkat pengungkapan wajib (Y)	Jumlah item yang diungkapkan dalam LKPD dibagi jumlah item pengungkapan dalam PSAP, dikalikan 100%	Rasio
Fiscal stress (X ₁)	Selisih pendapatan dan belanja dibagi pendapatan daerah	Rasio
Intergovernmental revenue (X ₂)	Total dana perimbangan dibagi total pendapatan, dikalikan 100%	Rasio
Kompleksitas pemerintah daerah (X ₃)	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah	Nominal
Belanja modal (X ₄)	Belanja modal dibagi total belanja daerah, dikalikan 100%	Rasio

Sumber: Data diolah Penulis (2026).

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan regresi data panel dengan bantuan EViews 12. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Pemilihan model regresi panel dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk menentukan model antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM), sedangkan uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model didasarkan pada tingkat signifikansi 5%.

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan Jarque-Bera, sedangkan multikolinearitas dilihat dari korelasi antarvariabel independen dengan batas 0,80. Heteroskedastisitas diketahui melalui pola residual. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai $Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji F pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen dinilai melalui adjusted R-squared. Data penelitian dikumpulkan dengan metode dokumentasi dari LKPD pemerintah provinsi. Data pengungkapan wajib diperoleh dari CaLK, sedangkan Fiscal Stress, Intergovernmental Revenue, dan Belanja Modal bersumber dari LRA. Kompleksitas Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah OPD. Seluruh data disusun berdasarkan provinsi dan tahun pengamatan untuk membentuk data panel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	0.600600	0.062800	0.523600	38.76000	0.157000
Maximum	0.810000	0.320000	0.680000	49.00000	0.240000
Minimum	0.360000	-0.230000	0.230000	27.00000	0.080000
Std. Dev.	0.131015	0.114483	0.111972	5.874747	0.040670
Observations	50	50	50	50	50

Sumber: Output EViews 12 (2026)

Fiscal Stress (X₁) memiliki tingkat penyebaran data yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tekanan fiskal yang dialami pemerintah daerah selama periode

pengamatan berbeda-beda, sehingga kemampuan masing-masing daerah dalam menghadapi tekanan fiskal relatif tidak sama. Intergovernmental Revenue (X₂) memperlihatkan penyebaran data yang relatif

rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat terhadap pendapatan daerah cenderung tidak memiliki perbedaan yang besar antar pemerintah daerah dalam sampel penelitian. Kompleksitas Pemerintah Daerah (X_3) menunjukkan variasi yang masih berada dalam rentang relatif terbatas. Hasil ini menggambarkan bahwa karakteristik kompleksitas pemerintah daerah dalam penelitian cenderung memiliki pola yang tidak terlalu berbeda antar daerah. Belanja Modal (X_4) menunjukkan tingkat penyebaran yang relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa proporsi belanja yang dialokasikan untuk belanja modal antar pemerintah daerah cenderung memiliki pola yang relatif serupa selama periode penelitian. Tingkat Pengungkapan Wajib (Y) menunjukkan penyebaran data yang

relatif rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah cenderung tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar antar daerah, walaupun masih terdapat variasi dalam tingkat pengungkapannya.

Pemilihan Model

Uji Chow menghasilkan probabilitas cross-section F sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga Fixed Effect Model lebih tepat dibandingkan Common Effect Model. Uji Hausman menghasilkan probabilitas cross-section random sebesar 0,0248. Nilai tersebut juga lebih kecil dari 0,05, sehingga Fixed Effect Model lebih tepat dibandingkan Random Effect Model. Kedua uji konsisten memilih Fixed Effect Model.

Tabel 5. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

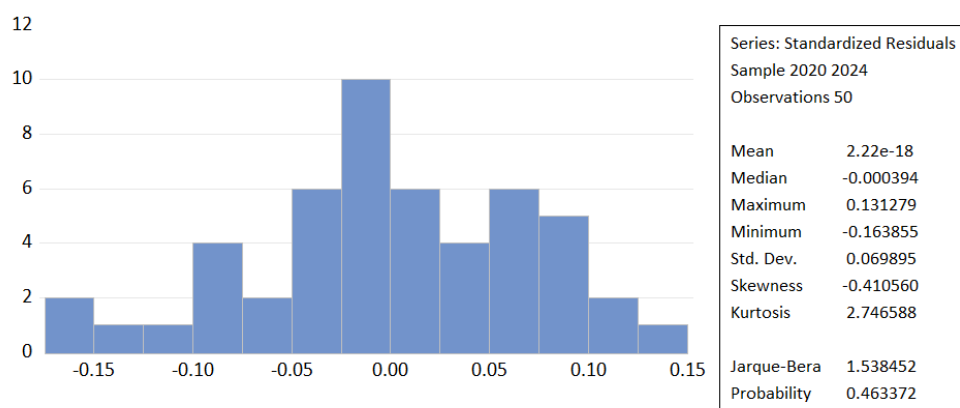
Uji Model	Nilai Probabilitas	Model Terpilih
Uji Chow	0,0000 < 0,05	Fixed Effect Model
Uji Hausman	0,0248 < 0,05	Fixed Effect Model

Sumber: Output EViews 12 (2026).

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode *Jarque-Bera* (JB) melalui perangkat lunak *EViews 12*. Nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,463372 lebih

tinggi dari 0,05. Dengan demikian, residual penelitian dinyatakan berdistribusi normal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.



Sumber: Output EViews 12 (2026)

Gambar 4. Hasil Uji Normalitas

Uji Multikolinearitas

Menurut Ismanto dan Pebruary (2021:127), model yang baik ditandai dengan tidak adanya korelasi yang signifikan antar variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel independen masih berada di bawah

batas korelasi yang ditetapkan. Dengan demikian, variabel independen dalam model tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat satu sama lain, sehingga dapat dinyatakan bahwa model penelitian

tidak mengalami gejala multikolinearitas dan memenuhi asumsi untuk analisis regresi.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

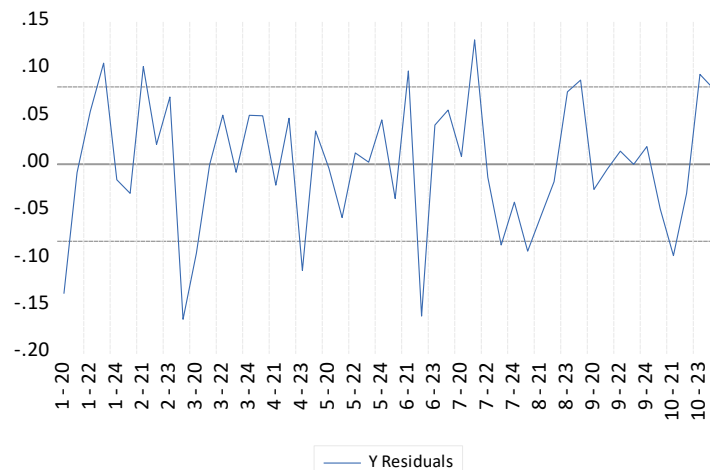
	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.194779	0.134098	0.242371
X2	-0.194779	1.000000	-0.572922	-0.230165
X3	0.134098	-0.572922	1.000000	-0.040658
X4	0.242371	-0.230165	-0.040658	1.000000

Sumber: Output EViews (2026)

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa residual berada dalam batas yang telah ditetapkan dan tidak

membentuk pola penyebaran yang mengindikasikan adanya perubahan varians. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa varians residual cenderung konstan. Dengan demikian, model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas dan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.



Sumber: Output EViews (2026)

Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu Fiscal Stress, Intergovernmental Revenue,

Kompleksitas Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.981276	0.283019	3.467174	0.0014
X1	-0.482446	0.148962	-3.238725	0.0026
X2	-0.536889	0.219891	-2.441614	0.0197
X3	-0.001886	0.006120	-0.308124	0.7598
X4	0.205828	0.346242	0.594462	0.5559

Sumber: Output EViews (2026)

Berdasarkan hasil regresi, konstanta sebesar 0,981276 menunjukkan nilai Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Pemerintah ketika seluruh variabel independen dianggap konstan pada nilai nol. Fiscal Stress dan Intergovernmental Revenue memiliki koefisien

negatif, masing-masing sebesar -0,482446 dan -0,536889, yang menunjukkan hubungan berlawanan arah dengan tingkat pengungkapan. Kompleksitas Pemerintah Daerah juga memiliki arah negatif sebesar -0,001886, sedangkan Belanja Modal memiliki arah positif sebesar 0,205828, yang menunjukkan hubungan searah dengan tingkat pengungkapan, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Koefisien Determinasi

Penggunaan Adjusted R-squared menjadi lebih tepat dibandingkan R-squared karena mampu menyesuaikan nilai koefisien determinasi dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam model (Ghozali, 2018).

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.069193	R-squared	0.770879
Mean dependent var	0.620400	Adjusted R-squared	0.688141
S.D. dependent var	0.146022	S.E. of regression	0.081545
Akaike info criterion	-1.943834	Sum squared resid	0.239384
Schwarz criterion	-1.408467	Log likelihood	62.59585
Hannan-Quinn criter.	-1.739963	F-statistic	9.317103
Durbin-Watson stat	2.100205	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Output EViews (2026)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R-squared sebesar 68,81%, variabel independen dalam model mampu menjelaskan variasi Tingkat Pengungkapan Wajib sebesar 68,81%, sedangkan 31,19% lainnya dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian.

Uji Simultan

Hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000000, lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Fiscal Stress, Intergovernmental Revenue, Kompleksitas Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah.

Tabel 9. Hasil Analisis Uji F

Indikator	Nilai
R-squared	0,770879
Adjusted R-squared	0,688141
F-statistic	9,317103
Prob(F-statistic)	0,000000
Durbin-Watson stat	2,100205

Sumber: Output EViews 12 (2026).

Uji Parsial

Berdasarkan tabel 7, diperoleh Fiscal Stress (X_1), berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah. Pada variabel Fiscal Stress, arah koefisien ditafsirkan dengan indikator yang digunakan bergerak berlawanan arah dengan tingkat tekanan fiskal. Nilai rasio yang semakin

rendah atau negatif menunjukkan kondisi fiskal yang relatif lebih tertekan; Intergovernmental Revenue (X_2), berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah. Kompleksitas Pemerintah Daerah (X_3), tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah; Belanja Modal (X_4), tidak berpengaruh

signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Fiscal Stress terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Fiscal Stress berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, dengan koefisien sebesar $-0,482446$ dan probabilitas $0,0026$. Koefisien negatif tersebut perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan arah pengukuran Fiscal Stress dalam penelitian ini. Nilai rasio yang semakin rendah atau negatif menunjukkan tingkat tekanan fiskal yang semakin tinggi. Dengan demikian, koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan fiskal, semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut mendukung hipotesis yang diajukan, sehingga H_1 diterima.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja ketika menghadapi tekanan fiskal. Fiscal Stress menggambarkan kondisi ketika kemampuan pendapatan pemerintah daerah mengalami tekanan dalam memenuhi kebutuhan belanja (Arnett, 2012). Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang tersedia secara transparan. Pengungkapan wajib laporan keuangan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut melalui penyajian informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, termasuk informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Temuan tersebut dapat dipahami melalui perspektif stewardship. Pemerintah daerah sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik dan menyediakan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Meskipun menghadapi tekanan fiskal, pemerintah daerah tetap berkewajiban menyajikan informasi keuangan secara transparan. Sejalan dengan teori agensi, pengungkapan informasi keuangan juga dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, tingkat tekanan fiskal yang lebih tinggi dapat berkaitan dengan peningkatan pengungkapan wajib sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Inata et al. (2022) yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi keuangan pemerintah daerah dan pengungkapan laporan keuangan. Rata-rata rasio Fiscal Stress dalam penelitian ini sebesar $0,0628$ menunjukkan nilai rata-rata berdasarkan pengukuran yang digunakan. Nilai tersebut perlu ditafsirkan dengan memperhatikan bahwa rasio yang semakin rendah menunjukkan kondisi fiskal yang relatif lebih tertekan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio Fiscal Stress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, berdasarkan arah pengukurannya, temuan tersebut mendukung hipotesis bahwa tekanan fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel tersebut memiliki koefisien regresi sebesar $-0,536889$ dengan nilai probabilitas $0,0197$, sehingga H_2 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan berkaitan dengan penurunan tingkat pengungkapan wajib.

Dalam penelitian ini, Intergovernmental Revenue diukur menggunakan proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah, sehingga mencerminkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Secara konseptual, besarnya proporsi transfer menggambarkan struktur pendapatan daerah, tetapi tidak secara langsung menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan wajib. Kelengkapan pengungkapan tetap mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, hubungan negatif yang ditemukan perlu dipahami sebagai hubungan statistik antara proporsi pendapatan transfer dan tingkat pengungkapan wajib, bukan sebagai bukti bahwa penerimaan transfer menyebabkan pengungkapan informasi menjadi tidak lengkap.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan teori agensi, yang menempatkan pemerintah daerah sebagai agent yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang

berkepentingan. Dalam konteks tersebut, pengungkapan laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi pendapatan transfer yang lebih besar tidak selalu diikuti oleh tingkat pengungkapan wajib yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini, Intergovernmental Revenue menunjukkan struktur pendapatan dan tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengaruh negatif yang ditemukan menunjukkan adanya hubungan antara tingkat ketergantungan fiskal dan tingkat pengungkapan wajib, bukan penghilangan informasi mengenai dana transfer.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari et al. (2024) dan Ananta et al. (2025) yang menemukan bahwa Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Rata-rata Intergovernmental Revenue sebesar 0,5236 atau 52,36% menunjukkan bahwa pendapatan transfer memiliki proporsi yang besar dalam struktur pendapatan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih menjadi karakteristik penting dalam struktur pendapatan daerah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut belum diikuti dengan peningkatan tingkat pengungkapan wajib.

Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat pengungkapan wajib, sehingga H_3 ditolak.

Jumlah OPD dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kompleksitas struktur organisasi pemerintah daerah. Namun, banyaknya unit organisasi tidak dengan sendirinya mencerminkan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan wajib mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, perbedaan jumlah OPD belum tentu diikuti oleh perbedaan tingkat pengungkapan wajib yang signifikan. Penelitian ini tidak menguji secara

langsung bagaimana koordinasi antar-OPD atau sistem pelaporan memengaruhi kelengkapan pengungkapan.

Dalam perspektif *stewardship*, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik dan menyampaikan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pemerintah daerah terlepas dari jumlah OPD yang dimiliki. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas yang diukur berdasarkan jumlah OPD belum terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengungkapan wajib.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Anggara dan Cheisviyanny (2020) serta Praptiningsih dan Khoirunnisa (2020) yang menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, jumlah OPD dalam penelitian ini memiliki rata-rata sebesar 38,76, dengan nilai minimum 27 dan maksimum 49. Meskipun terdapat perbedaan jumlah OPD antar pemerintah provinsi di Pulau Sumatera, perbedaan tersebut tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat pengungkapan. Dengan demikian, jumlah OPD belum dapat menjadi faktor yang menjelaskan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga H_4 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa proporsi belanja modal terhadap total belanja belum terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengungkapan wajib dalam model penelitian ini.

Belanja modal mencerminkan alokasi belanja pemerintah daerah untuk memperoleh aset dan mendukung pembangunan. Namun, besarnya proporsi belanja modal tidak secara langsung menunjukkan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Pengungkapan tersebut mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga besarnya alokasi belanja modal tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menjelaskan tingkat pengungkapan. Penelitian ini juga tidak menguji

secara langsung hubungan antara alokasi belanja modal dan kualitas proses pelaporan keuangan.

Dalam perspektif *stewardship*, pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola sumber daya publik dan menyampaikan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tanggung jawab tersebut mencakup pengelolaan belanja dan penyajian informasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi proporsi belanja modal belum terbukti berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan wajib.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sari et al. (2024) yang menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan statistik deskriptif, Belanja Modal memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1570 atau 15,70% dari total belanja pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Meskipun terdapat variasi alokasi Belanja Modal antardaerah, variasi tersebut tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat pengungkapan.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,688141 menunjukkan bahwa Fiscal Stress, Intergovernmental Revenue, Kompleksitas Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal mampu menjelaskan 68,81% variasi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah. Sementara itu, 31,19% sisanya merupakan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model penelitian. Penelitian terdahulu mengidentifikasi ukuran pemerintah daerah (Sari et al., 2024), kekayaan daerah (Jannah & Handayani, 2025), dan temuan audit (Anggara & Cheisviyanny, 2020) sebagai faktor yang juga berkaitan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, meskipun pengaruhnya belum diuji dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Fiscal Stress dan Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah. Namun, arah negatif pada variabel Fiscal Stress perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan karakteristik pengukurannya, yaitu nilai rasio yang semakin rendah menunjukkan tekanan fiskal yang semakin tinggi. Kompleksitas Pemerintah Daerah

dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah. Temuan penelitian dikaitkan dengan teori *stewardship*, yang menekankan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya publik untuk menyajikan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Menurut perspektif teori agensi, pengungkapan laporan keuangan merupakan sarana untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan mendukung pengawasan atas pengelolaan. Hasil negatif pada Intergovernmental Revenue menunjukkan bahwa proporsi dana transfer yang lebih tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan tingkat pengungkapan wajib. Hasil tidak signifikan pada Kompleksitas Pemerintah Daerah dan Belanja Modal menunjukkan bahwa belum terbukti memiliki hubungan signifikan dengan tingkat pengungkapan wajib.

Rekomendasi

Secara simultan, Fiscal Stress, Intergovernmental Revenue, Kompleksitas Pemerintah Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah. Nilai Adjusted R-squared sebesar 68,81% menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 68,81% variasi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah, sedangkan 31,19% sisanya merupakan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model penelitian. Hasil ini menggambarkan kemampuan penjelasan model berdasarkan variabel-variabel yang digunakan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang relevan dengan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, seperti ukuran pemerintah daerah (Sari et al., 2024), kekayaan daerah (Jannah & Handayani, 2025), atau temuan audit (Anggara & Cheisviyanny, 2020). Selain itu, perluasan periode pengamatan dan cakupan objek penelitian dapat dipertimbangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

PERNYATAAN

Penggunaan AI

Selama penyusunan artikel ini, penulis menggunakan ChatGPT secara terbatas untuk

membantu memperbaiki struktur kalimat, memparafrasekan tulisan, dan menyempurnakan penggunaan bahasa. Seluruh isi artikel tetap ditinjau dan disesuaikan oleh penulis, serta penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan hasil publikasi.

Kontribusi Penulis

Penulis pertama berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, penyusunan metodologi, pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan naskah artikel. Penulis kedua dan ketiga berkontribusi dalam peninjauan, penyuntingan, dan penyempurnaan naskah.

Pendanaan

penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pendanaan public, komersial, maupun nirlaba

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penelitian dan publikasi artikel ini

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. Z., Zulkifli, Z., & Oktarida, A. (2024). Determinasi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Pulau Sumatera. *Competitive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 127–138.
- Ananda, A. P. (2021). Pengaruh karakteristik kompleksitas dan tingkat penyimpangan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi*, 11(1).
- Ananta, H. N., Masdar, R., Din, M., Usman, R., & Karim, F. (2025). The influence of leverage, intergovernmental revenue, and capital expenditure on the level of disclosure of local government financial reports. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research (MODERN)*, 4(4), 283–296.
- Anggara, R., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 256–280. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216>
- Arnett, S. (2012). Fiscal stress in the U.S. states: An analysis of measures and responses. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 24(2), 215–239.
- Astuti, W., Widaryanti, & Wahyuningsih, P. (2022). Karakteristik pemerintah daerah dan tingkat pengungkapan laporan keuangan: Studi empiris pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2016–2019. *Jurnal Stiepena*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Fahira, S. R., & Musyarofah, S. (2023). Report on local government finances determinants: Evidence from stewardship perspectives. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 11(1), 68. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v11i1.19631>
- Fasa, R. F. D., Masnilla, N., & Hartaty, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi se-Sumatera. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(4).
- Finakesti, L., Aprianti, S., Yulina, B., & Hartaty, S. (2022). Determinan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 6(1), 71–80.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Hiola, Y., & Harun, E. (2021). Pengaruh karakteristik, kompleksitas dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 89–101.
- Inata, L. C., Saraswati, E., & Ghofar, A. (2022). Financial statements disclosure on Indonesian local government: IPSAS and PSAP disclosure approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 611–625.
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan EViews dalam analisis data penelitian*. Deepublish.
- Jannah, W. El, & Handayani, N. (2025). Pengaruh intergovernmental revenue, rasio kemandirian daerah, dan kekayaan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Ilmu*

- Dan Riset Akuntansi*, 14(3).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/details/5095/pp-no-71-tahun-10>.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Luthfi, M., & Sari, V. F. (2023). Analisis tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2).
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik (edisi terbaru). *Andi Offset*.
- Praptiningsih, & Khoirunnisa, J. (2020). Pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah, jumlah SKPD dan opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah Nusa Tenggara. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 277–285.
- Putra, D. A., Z. A., K., & Desi, I. (2023). Analisis faktor-faktor tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi Dan Sistem Informasi (EKSISTANSI)*, 12(2), 14–22.
- Putri, H., A., Hartati, S., & Aryani, Y., A. (2023). Determinan fiscal stress pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7 (2), 209–219.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10032886>
- Salfadhilah, A., Sumardjo, M., & Wijaya. (2021). Pengaruh karakteristik daerah dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akunida*, 7(1), 13–27.
- Sari, P. L., Periansya, & Indriasari, D. (2024). Determinan Tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(12), 7414–7424.
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di seluruh Provinsi Indonesia. *MODUS*, 30(1).
- Sopiyan, A. R., Indriasari, D., Periansya, & Adelima, D. (2024). Analisis determinan tingkat pengungkapan atas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 8(1), 91–104.
- Sulistiyowati, T., & Rahmayati, A. (2024). Determinants of the disclosure level of local government financial statements in Central Java Province. *Proceeding of the 4th International Conference on Islamic Economics Studies*, 4(1).
- Suwardjono. (2020). *Teori akuntansi: Perekayasaan pelaporan keuangan* (edisi ketiga). BPFE.
- Utami, S. R., & Sulardi, S. (2020). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 253.